

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN STRUKTUR
DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN
ARJASARI KABUPATEN BANDUNG**

Husaeri Priatna

herieckall@gmail.com

Iseu Anggraeni

ise.maheza@gmail.com

Lia Rahmayanti

liarahmayanti503@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen yang kemudian dilakukan uji hipotesis t serta uji hipotesis F untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruhnya. Adapun populasi penelitian ini yaitu seluruh Desa / Kelurahan di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sebanyak 11 desa / kelurahan, serta sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel yang diambil mulai dari pimpinan (kepala desa) sebagai pengambil kebijakan, sampai bawahan yang mengetahui dan terlibat langsung dengan variabel-variabel yang diteliti, maka dari 11 desa / kelurahan masing-masing diambil sampel sebanyak 8 orang, sehingga total sampel menjadi 88 responden.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara simultan dan parsial Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Adapun hasil Koefisien Determinasi sebesar 87,1 % sedangkan sisanya sebesar 12,9% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Kata kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi dan Kinerja Pemerintah Desa

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja pemerintah menunjukkan kemampuan dan prestasi pemerintahan dalam menjalankan instansinya untuk mewujudkan tujuan yang mengarah kepada ketercapaian pelayanan publik dan kepuasannya. Kepentingan kinerja pemerintah dibutuhkan untuk menilai seberapa jauh instansi pemerintah dapat menerapkan visi, misalnya agar pelayanan publik dapat terwujud dengan baik. Salah satu bentuk konsistensinya adalah perlu dilakukannya bentuk aktivitas yaitu melakukan

**Analisis Keuntungan Usahatani Maggot BSF di P4s
Al-Mukhlis Kecamatan Banjaran Kabupaten
Bandung | Wini Fetia Wardhiani, Lily Sumarti, Hanna
Arizky Nursaputri**

penjaringan aspirasi masyarakat dan adanya kejelasan dalam penyusunan anggaran sehingga dapat tercapai suatu sistem yang dapat mencegah atau meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam mewujudkan *good governance*.

Kinerja pemerintah menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan *output* tetapi juga dari sisi *outcome*, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan data kualitas pelayanan masyarakat kepada pemerintah yang menerapkan sistem desentralisasi dalam kinerja pemerintahannya yang diukur melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM), kemudian data mencatat pelayan yang diberikan terkait dokumen-dokumen di kecamatan Arjasari pada tahun 2017 adalah baik dengan nilai rata-rata sebesar 3.213, data tersebut diperoleh dari angket yang disebarakan kepada desa-desa di kecamatan Arjasari kabupaten Bandung, adapun dari unsur pelayanan yang harus mendapat perhatian lebih adalah unsur waktu penyelesaian, sistem, mekanisme dan prosedur serta produk spesifikasi jenis pelayanan. (Sumber : <https://www.ppid.bandungkab.go.id>)

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah juga dapat dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut EKPPD. EKPPD merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), informasi keuangan daerah dan laporan-laporan lainnya yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. (Sumber : <https://peraturan.bpk.go.id>)

Salah satu laporan kinerja instansi pemerintah yang baik bisa dilihat dari anggaran dan realisasi yang sudah sesuai. Namun pada kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh penulis di tempat penelitian mengindikasikan bahwa indikator kinerja kecamatan Arjasari belum semuanya sesuai dengan target dan tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran yang masih tinggi. Laporan realisasi anggaran pemerintahan kecamatan Arjasari kabupaten Bandung tahun anggaran 2017-2018 mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan realisasi anggaran dinilai masih fluktuatif.

Tingginya SILPA ditahun 2018 menggambarkan bahwa APDB kurang sehat dan anggaran yang begitu besar belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu adanya tindakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa di kecamatan Arjasari. Tingginya SILPA di kecamatan Arjasari ini mengindikasikan bahwa belum efektifnya anggaran yang disusun, baik dari proses penganggaran hingga pelaksanaan anggaran, dari sisi penganggaran SILPA terjadi karena senjangan anggaran baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Pemahaman akan konsep desentralisasi pada pemerintah desa di kecamatan Arjasari belum mantap, hal ini tercermin dari mentalitas dari aparat pemerintah desa di kecamatan Arjasari belum mengalami perubahan yang mendasar, seperti masih adanya beberapa warga yang mengeluhkan lambatnya pelayanan yang terjadi pada pemerintah desa di kecamatan Arjasari, hal ini terjadi karena perubahan sistem yang ada tidak dibarengi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintah yang baru dan berbasis teknologi.

Menurut Riyanto (2013:27) bahwa hubungan karakteristik anggaran, dalam hal ini kejelasan sasaran anggaran, dengan kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang bersifat *psychological attribute*. Efektif atau tidaknya kejelasan sasaran anggaran sangat ditentukan oleh *psycological attribute*, sehingga faktor-faktor individual tersebut sangat dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran dalam menilai kinerja pemerintahan desa di kecamatan Arjasari.

Penyusunan anggaran pada tingkat satuan kerja juga akan melibatkan bagian-bagian/sub bagian yang ada dalam satuan kerja tersebut, karena bagian-bagian/sub bagian inilah yang akan melaksanakan semua program kerja dan anggaran yang akan disusun. Oleh karena itu keterlibatan/partisipasi aktif dari masing-masing kepala

bagian/sub bagian sangat diperlukan supaya anggaran yang disusun mampu mengakomodir kebutuhan masing-masing bagian/sub bagian tersebut. Dalam implementasinya pada tahapan inilah kemungkinan selalu adanya keterlambatan dalam penyusunan anggaran yang kemudian berakibat tidak komitemennya suatu rencana anggaran pembiayaan, akibatnya pimpinan tertinggi dari satuan kerja tersebut menyusun anggaran untuk tahun yang akan datang dengan dasar realisasi anggaran tahun yang lalu ditambah dengan estimasi kenaikan-kenaikan yang dianggap wajar.

Struktur organisasi desentralisasi secara umum ditujukan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur sentralisasi yang tinggi, sebagian keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi. (Mardiasmo, 2019:2017)

Struktur desentralisasi itu sendiri yakni struktur yang menunjukkan bahwa adanya penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan otonomi daerah. (Sumber : <https://www2.bkpm.go.id>) Struktur organisasi desentralisasi secara umum ditujukan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur sentralisasi yang tinggi, sebagian keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi.

Kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi organisasi menurut asumsi peneliti akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa di kecamatan Arjasari, hal ini didukung oleh penelitian terdahulu Taufik Hidayat dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sasaran anggaran kejelasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, struktur desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (Sumber : <https://repository.uinjkt.ac.id>)

Berdasarkan uraian diatas, penulis berasumsi bahwa akan terjadi hal yang sama pada pemerintahan desa di kecamatan Arjasari, yang mana penelitian ini sebagaimana yang telah disebutkan diatas akan dilaksanakan pada pemerintahan desa yang ada di kecamatan Arjasari. Dengan demikian, penulis mengambil judul penelitian ini yaitu : **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penulis melaksanakan penelitian yaitu secara studi survey pada pemerintahan desa yang berada di kecamatan Arjasari dengan 11 desa yakni, Ancolmekar, Arjasari, Baros, Batukarut, Lebakwangi, Mangunjaya, Mekarjaya, Patrolsari, Pinggirsari, Rancakole dan Wargaluyu, yang berada di kecamatan Arjasari kabupaten Bandung 40379. Adapun waktu pelaksanaan penelitian skripsi ini dilaksanakan selama lima bulan, yaitu dimulai dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Anthony dan Govindarajan (2011:72) bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu.

Pengertian anggaran sektor publik menurut Indra Bastian (2010:98) adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Mardiasmo (2019:201) menyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik.

Adapun pengertian kejelasan sasaran anggaran Menurut Indra Bastian (2010:191) adalah suatu rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendanaan yang diharapkan untuk membiayai dalam waktu periode tertentu.

2.1.2 Pengertian Struktur Desentralisasi

Struktur organisasi desentralisasi menurut Mardiasmo (2019:207) secara umum ditujukan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur sentralisasi yang tinggi, sebagian keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi.

Yuni (2013:39) menjelaskan bahwa struktur desentralisasi merupakan seberapa besar wewenang yang diperoleh oleh unit kegiatan kerja dengan dan pengambilan keputusan dalam masalah keuangan, operasional, peningkatan mutu pegawai, pengalihan atau alokasi rekening maupun sumber daya manusia.

Hansen & Mowen (2015:543) menjelaskan bahwa struktur desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah.

2.1.3 Pengertian Kinerja Pemerintah Desa

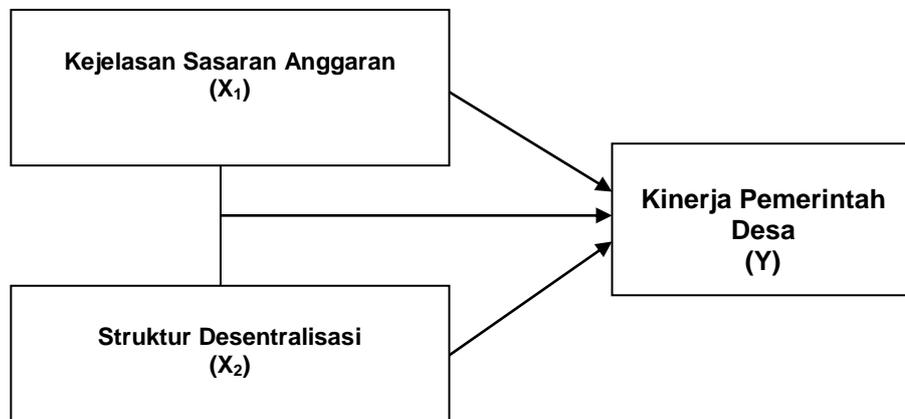
Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sutrisno (2016:172) bahwa kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Menurut Mangkunegara (2017:67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Definisi kinerja pemerintah dikemukakan oleh Bastian (2010:98) bahwa kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi tersebut. Menurut Prawirosuntono (2014:51) kinerja pemerintah adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi pemerintahan, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan berkaitan kuat dengan tujuan-tujuan strategi operasional.

2.2 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa dapat digambarkan skema paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 1
Bagan Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
2. Struktur Desentralisasi secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kinerja Pemerintah Desa (Y)
2. Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁)
3. Struktur Desentralisasi (X₂)

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini mengungkapkan keadaan masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung dan data yang digunakan menekankan pada data-data *numeric* (angka).

3.2.1 Populasi dan Sampel

3.2.1.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) mendefinisikan populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yang berjumlah 11 (sebelas) desa yaitu:

1. Desa Ancolmekar
2. Desa Arjasari
3. Desa Baros
4. Desa Batukarut
5. Desa Lebakwangi
6. Desa Mangunjaya
7. Desa Mekarjaya
8. Desa Patrolsari
9. Desa Pinggirsari
10. Desa Rancakole
11. Desa Wargaluyu

3.2.1.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:62) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85) bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai desa mulai dari pimpinan (kepala desa) sebagai pengambil kebijakan, sampai bawahan yang mengetahui dan terlibat langsung dengan keuangan yaitu :

Tabel 1
Sampel Penelitian (Responden)

No	Nama Desa / Kelurahan	Kepala Desa / Lurah	Sekretaris Desa / Kelurahan	Kaur / Kasi	Jumlah
1	Desa Ancol mekar	1	1	6	8
2	Desa Arjasari	1	1	6	8
3	Desa Baros	1	1	6	8
4	Desa Batukarut	1	1	6	8
5	Desa Lebakwangi	1	1	6	8
6	Desa Mangunjaya	1	1	6	8
7	Desa Mekarjaya	1	1	6	8
8	Desa Patrolsari	1	1	6	8
9	Desa Pinggirsari	1	1	6	8
10	Desa Rancakole	1	1	6	8
11	Desa Wargaluyu	1	1	6	8
Total Sampel					88

Sumber : Hasil Observasi / Pra survey

Berdasarkan data diatas, maka sampel dalam penelitian ini yang dipilih sebanyak 88 orang responden yang tersebar di desa dan kelurahan di Wilayah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Data diatas sesuai yang tertera pada struktur organisasi desa dan kelurahan, kecuali para staf desa yang tidak termasuk dalam kategori responden.

3.2.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y), apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2017:275) bahwa : "Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2".

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi dengan Kinerja Pemerintah Desa.

Adapun untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, dilihat pedoman tabel kriteria koefisien korelasi sebagai berikut :

Tabel 2
Koefisien Korelasi Dan Taksirannya

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017:231)

3. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \cdot 100\%$$

Sumber : Sutrisno Hadi (2004:39)

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
- Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

4. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015) mendefinisikan bahwa : "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

a. Uji t (Parsial)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Setelah menghitung nilai t_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
- Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai sig $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

b. Uji F (Simultan)

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh)
- Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai sig $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

c. Menentukan Taraf Signifikansi

Hasil analisis dan pengujian hipotesis tingkat signifikannya adalah 0,05% ($\alpha = 0,05$) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.799	1.921		.416	.678
1 X1	.506	.059	.540	8.547	.000
X2	.457	.064	.447	7.085	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,799 + 0,506 X_1 + 0,475 X_2$$

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta pada persamaan sebesar 0,799 menjelaskan jika kejelasan sasaran anggaran (X_1) dan struktur desentralisasi (X_2) konstan (tidak berubah) atau sama dengan nol maka kinerja pemerintahnya adalah sebesar 0,799.
- b. Koefisien regresi linear berganda untuk kejelasan sasaran anggaran (X_1) bernilai positif sebesar 0,506 menunjukkan perubahan nilai kinerja pemerintah (Y) jika kejelasan sasaran anggaran meningkat sebesar satu persen pada saat variabel lain tidak mengalami perubahan, maka akan terjadi peningkatan kinerja pemerintah sebesar 0,506 pada saat variabel lain tidak mengalami perubahan.
- c. Koefisien regresi linear berganda untuk struktur desentralisasi (X_2) bertanda positif sebesar 0,475 menunjukkan perubahan nilai kinerja pemerintah (Y) jika struktur desentralisasi meningkat sebesar satu persen pada saat variabel lain tidak mengalami perubahan, maka akan terjadi peningkatan kinerja pemerintah sebesar 0,475 pada saat variabel lain tidak mengalami perubahan.

**Analisis Keuntungan Usahatani Maggot BSF di P4s
AI–Mukhlis Kecamatan Banjaran Kabupaten
Bandung | Wini Fetia Wardhiani, Lily Sumarti, Hanna
Arizky Nursaputri**

4.1.2 Analisis Korelasi

Tabel 4
Hasil Analisis Korelasi Pearson
Correlations

		X1	X2	Y
X1	Pearson Correlation	1	.787 ^{**}	.892 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	88	88	88
X2	Pearson Correlation	.787 ^{**}	1	.872 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	88	88	88
Y	Pearson Correlation	.892 ^{**}	.872 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	88	88	88

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Tabel 4
Hasil Analisis Korelasi Ganda
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.933 ^a	.871	.868	3.292951

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

- a. Korelasi antara Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Kinerja Pemerintah Desa adalah sebesar 0,892 dengan signifikansi 0,000 yang berarti antara variabel independen dengan variabel dependen memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat karena nilai berada di rentang nilai 0,80-1,000 pada tabel koefisien korelasi. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan kejelasan sasaran anggaran akan diikuti oleh kenaikan kinerja pemerintah.
- b. Korelasi antara Struktur Desentralisasi dengan Kinerja Pemerintah Desa adalah sebesar 0,872 dengan signifikansi 0,000 yang berarti antara variabel independen dengan variabel dependen memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat karena nilai berada di rentang nilai 0,80-1,000 pada tabel koefisien korelasi. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan struktur desentralisasi akan diikuti oleh kenaikan kinerja pemerintah.
- c. Korelasi ganda antara Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi dengan Kinerja Pemerintah Desa sebesar 0,933, yang berarti antara variabel independen dengan variabel dependen secara bersama-sama memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat karena nilai berada di rentang nilai 0,80-1,000 pada tabel koefisien korelasi. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi akan diikuti oleh kenaikan kinerja pemerintah.

4.1.3 Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4, bahwa secara simultan dengan melihat besarnya koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,871 yang menunjukkan bahwa 87,1 % kinerja pemerintah dapat dijelaskan oleh kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi sedangkan sisanya sebesar 12,9% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.1.4 Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)

1. Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui diterima atau ditolak hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
 - Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.
- a. Pada tabel 3 diatas nilai t-hitung untuk Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) adalah 8,547, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,988. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian pada kolom sig.diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Y).
 - b. Pada tabel 3 diatas nilai t-hitung untuk Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) adalah 7,085, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,988. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian pada kolom sig.diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Struktur Desentralisasi (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Y).

2. Uji F (Simultan)

**Tabel 4.9
Hasil Perhitungan Uji F**

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6225.224	2	3112.612	287.048	.000 ^b
Residual	921.700	85	10.844		
Total	7146.924	87			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Untuk mengetahui diterima atau ditolak hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 287,048 sedangkan nilai F_{tabel} diperoleh sebesar 3,10. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian dari tabel ANOVA^a diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-f sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat

**Analisis Keuntungan Usahatani Maggot BSF di P4s
Al-Mukhlis Kecamatan Banjaran Kabupaten
Bandung | Wini Fetia Wardhiani, Lily Sumarti, Hanna
Arizky Nursaputri**

signifikansinya bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) dan Struktur Desentralisasi (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Y).

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Hasil dari regresi memperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah desa yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,547 > 1,192$), dan memiliki tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah pada pemerintah desa di kecamatan Arjasari kabupaten Bandung. Hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja pemerintah desa jika dilihat dari hasil koefisien regresinya adalah positif.

Berdasarkan pada pembahasan tersebut hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yaitu Anggun Wanudya (2019), Taufik Hidayat (2015), Gede Herry Merta Primadana(2014), dan Annisa Suwandi (2013) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar kejelasan sasaran anggaran akan mempengaruhi kinerja pemerintah pada pemerintah desa di kecamatan Arjasari.

2. Pengaruh Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Hasil dari regresi memperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel struktur desentralisasi terhadap kinerja pemerintah desa bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,085 > 1,920$), dan memiliki tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa struktur desentralisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kinerja pemerintah pada pemerintah desa di kecamatan Arjasari kabupaten Bandung. Hubungan antara struktur desentralisasi dengan kinerja pemerintah desa jika dilihat dari hasil koefisien regresinya adalah positif.

Berdasarkan pada pembahasan tersebut hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yaitu Mila Suhardini (2014), Gede Herry Merta Primadana(2014), dan Annisa Suwandi (2013) yang menyatakan bahwa struktur desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika struktur desentralisasi naik akan mempengaruhi naiknya mempengaruhi kinerja pemerintah pada pemerintah desa di kecamatan Arjasari.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah sesuai dengan teori yang mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan, mewujudkan tanggung jawab publik, untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.

3. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel 4.25 di atas diperoleh nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari significance level 0,05 (5%), yaitu $0,000 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} yang menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 57,208

sedangkan F_{tabel} sebesar 3,12. dari hasil tersebut terlihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $287,048 > 3,12$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa yang merupakan variabel dependen. Besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja pemerintah sebesar 87,1% kinerja pemerintah dapat dijelaskan oleh kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi sedangkan 12,9% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Berdasarkan pembahasan tersebut, hasil penelitian ini mendukung penelitian Gede Herry Merta Primadana (2014), dan Annisa Suwandi (2013) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian Mila Suhardini (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini berarti yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi dapat dijadikan sebagai unsur untuk mengetahui besarnya kinerja pemerintah yang terjadi pada pemerintah desa di kecamatan Arjasari.

Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah sesuai teori yang mengungkapkan bahwa terdapat interaksi antara anggaran yang jelas dan terperinci yang merupakan wujud dari Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Struktur Desentralisasi yang artinya menerapkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemudian mempengaruhi kinerja pemerintah.

V. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Dengan demikian Kejelasan Sasaran Anggaran memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, artinya semakin baik Kejelasan Sasaran Anggaran maka akan semakin baik Kinerja Pemerintah Desa demikian pula sebaliknya.
2. Struktur Desentralisasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Dengan demikian Struktur Desentralisasi memberikan kontribusi positif dalam menentukan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. artinya semakin baik Struktur Desentralisasi maka akan semakin baik Kinerja Pemerintah Desa demikian pula sebaliknya
3. Secara simultan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Kemudian besarnya pengaruh ditunjukkan oleh hasil Koefisien Determinasi (KD) sebesar 87,1 % sedangkan sisanya sebesar 12,9% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti Pengendalian Internal, Sistem Pengendalian Manajemen, Sistem Informasi, dan lain sebagainya.

5.2 Saran

Saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis terhadap pihak perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa, maka untuk meningkatkan kembali kejelasan sasaran anggaran pemerintah desa di kecamatan Arjasari dapat menggunakan sistem partisipasi anggaran dalam penyusunannya supaya anggaran yang disusun lebih jelas karena setiap bagian mempunyai pengetahuan yang lebih jelas terkait anggaran yang dibutuhkan.
2. Struktur Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa, maka hendaknya pemerintah desa di kecamatan Arjasari lebih menyadari bahwa desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat sehingga akses dalam mendapatkan pelayanan dasar semakin luas. Maka pemerintah desa perlu memperhatikan aspirasi masyarakat untuk menyediakan kebutuhan pelayanan dasar tersebut.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. maka untuk meningkatkan kinerja pemerintah pada pemerintah desa di kecamatan Arjasari dapat menerapkan perhatian terhadap faktor-faktor tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh kepada peningkatan kinerja. Selain itu juga, pihak-pihak terkait diharapkan lebih meningkatkan komitmen organisasi dan kejelasan sasaran anggaran yang bertujuan untuk meminimalisir ketidaksesuaian anggaran dengan lebih memperhatikan tujuan dan sasaran dari anggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA :

- Anthony, Robert N dan Govindarajan. 2011. Sistem Pengendalian Manajemen, Jilid 2. Tangerang : Karims Publising Group.
- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Hansen dan Mowen. 2015. Akuntansi Manajerial Edisi kedelapan, Jilid 1, Terjamah oleh Deny Amos Kwary. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Taufik. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Akuntabilitas Vol. VIII No.2, Agustus 2015 Halaman 148 -161
- Mardiasmo. 2019. Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.Offset
- Riyanto, Bambang, 2013. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi keempat. Yogyakarta :Yayasan Penerbit FE UGM.
- Sugiarti, Yuni. 2013. Analisis dan Perancangan UML, General VB. 6. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. Indonesia.
- PP Nomor 8 Tahun 2006, <https://peraturan.bpk.go.id>

**Akurat|JurnalIlmiahAkuntansi-Vol.13 No.3 September-Desember
2022|hlm98-112
P-ISSN :2086-4159 E-ISSN :2656-6648**

<https://www.ppid.bandungkab.go.id>

<https://www2.bkpm.go.id>